



Tanpa Gejala Tak Perlu Dirawat di RS

■ Pemda DIY Terapkan Isolasi Mandiri

Di pedoman Revisi 5, baru akan diberlakukan 15 Agustus. Jadi kondisi yang ringan bisa tidak usah di rumah sakit.

Pembajun Setyaningastutie
Kepala Dinas Kesehatan DIY

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY akan mulai menerapkan isolasi di rumah maupun selter bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala. Penanganan tidak akan dilakukan di rumah sakit (RS) pada 15 Agustus 2020 mendatang khusus bagi mereka pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala

la serta gejala ringan, bahkan sedang.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie mengatakan, hal tersebut mengacu pada Aturan Pedoman Pencegahan Pengendalian Covid Revisi 5 Kementerian Kesehatan.

● **kehalaman 7**

LACAK-PULIHKAN

- Mulai 15 Agustus pasien Covid-19 tanpa gejala diminta isolasi mandiri.
- Isolasi bisa dilakukan di rumah atau fasilitas yang disediakan pemerintah.
- Isolasi mandiri dilakukan 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
- Empat kabupaten di DIY sudah memiliki selter untuk keperluan isolasi.

Nilai Berita	Sifat	Tipe
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untu
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untu
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Tanpa Gejala Tak Perlu

• Sambungan Hal 1

Di sana disebutkan bahwa tata laksana klinis pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala, sakit ringan, atau sedang, tidak memerlukan rawat inap di RS. Tapi harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Isolasi dilakukan di rumah maupun di fasilitas publik yang disiapkan pemerintah.

"Di pedoman Revisi 5, baru akan diberlakukan 15 Agustus. Jadi kondisi yang ringan bisa tidak usah di rumah sakit. Sekarang, sampai hari ini (kemarin), teman-teman di pelayanan masih ragu. Ada keraguan apa kalau dipulangkan dari rumah sakit apakah bisa benar-benar patuh dengan protokol kesehatan. Jangan sampai cuma beli rokok di sana, beli minum di sana. Terus berkaitan dengan BPJS juga," urainya, di Kompleks Kepatihan, Kamis (13/8).

Lebih lanjut, Pembajun mengatakan bahwa hampir semua kabupaten/kota telah memiliki selter yang digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala. Namun di Kota Yogyakarta, belum ada selter tersebut. "Masih kita kejar adalah kota. Kota belum punya selter. Kalau dengan pedoman revisi lima yang baru, ya, memang lebih banyak di selter," ucapnya.

Pembajun menjelaskan, kota sesang mencari tempat untuk bisa dijadikan selter. Ia mengatakan, ketika pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala tidak dirawat di selter dan justru dirawat di rumah sakit, maka akan memakan biaya yang mahal karena penanganannya akan dilak-

ukan sesuai prosedur penanganan Covid-19 dengan alat pelindung diri (APD) dan seterusnya. "Orangnya stres, ya, boros APD karena rumah sakit sesuai protokol. Kalau selter lebih homy, diharapkan nyaman jadi cepat sembuh," ucapnya.

Pembayun mencontohkan, untuk selter yang ada di Kabupaten Bantul memiliki kapasitas tempat tidur hingga 500. Namun untuk Kulon Progo, mengingat kasus di sana tidak sebanyak di wilayah lain yang ada di DIY, mereka meminta pasien isolasi di rumah. "Kayak Kulon Progo, mereka bilang warga isolasi di rumah. Apa iya isolasi sudah sesuai aturan," tanyanya.

Sejauh ini, Pembajun mengatakan belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan berupa selter untuk penanganan pasien tersebut. Bantuan yang selama ini diterima dari swasta yakni berupa logistik. "Itu bagus. Peran kita bersama. Tapi untuk gedung sendiri belum ada," bebernnya.

Sementara itu, angka kesembuhan yang meningkat di DIY dijelaskan Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Irene adalah karena mayoritas pasien Covid-19 adalah tanpa gejala sehingga dapat sembuh lebih cepat dan tidak memperburuk kondisi seperti yang terjadi pada mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. "Banyak yang tanpa gejala cepat ditemukan. Mereka belum bergejala cepet juga sembuh. Kita mencari. Proaktif cari," pungkasnya.

Tidak setuju

Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid mengaku tidak setuju bila pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Menurutnya, hal tersebut tidak efektif ter-

lebih akan merisikol konflik sosial di tengah masyarakat. "Mestinya harus diisolasi, seperti kemarin dikarantina di rumah sakit. Kalau di rumah tidak sesederhana itu, di perkampungan banyak sekali menimbulkan konflik sosial," ucapnya kepada Tribun Jogja, Kamis (13/8).

Ia mencontohkan, seperti di kampungnya terdeteksi 5 orang dinyatakan positif. Terdapat kendala air bersih di sana di mana kesehariannya mengambil air di kampung sebelah. Namun setelah adanya orang yang terkonfirmasi positif, maka akses untuk mengambil air ditutup.

"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang berhati-hati untuk menjaga kampungnya. Tapi yang kita lihat di sini konflik sosial itu nyata. Memang lebih baik mereka yang sudah dinyatakan positif, tetap harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai dinyatakan sembuh," ucapnya.

Risiko lain yang timbul, bila pasien positif tidak dirawat di rumah sakit melainkan di rumah atau di selter yakni penanganan keluhan medis jadi lambat. Berbeda ketika yang bersangkutan menjalani perawatan di rumah sakit, ketika ada keluhan sakit maka petugas medis dengan cepat mampu memberikan penanganan sehingga tidak sampai parah. "Covid-19 ini sebetulnya bukan aib. Tapi kita semua berupaya mencegah penularannya. Termasuk memang yang positif ada di rumah sakit," tegasnya.

Anggota Fraksi Nasdem PSI PD DPRD DIY tersebut mengatakan bahwa terkait alasan biaya yang dikeluarkan besar untuk menangani pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala, itu bukan sebuah alasan yang mendasar. Pasalnya pemerintah pusat juga telah

mengucurkan dana yang besar di bidang kesehatan untuk menangani Covid-19.

"Kesehatan masyarakat dilindungi undang-undang. Itu kewajiban pemerintah. Siapa sih yang mau akan sakit? Selain itu, bagi warga yang kurang mampu memang akan lebih baik mendapatkan perawatan di rumah sakit karena semua terjamin," ucapnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa tidak bisa memukul rata kesadaran seluruh warga DIY. Ia mencontohkan kasus positif di Bantul, di mana ia berprofesi sebagai pedagang pasar dan tetap bekerja meski sudah dinyatakan positif.

"Tidak ada pilihan. Kalau mau tetap hidup, bisa makan ya berangkat ke pasar. Itu cukup mengecewakan. Maka dari itu kembali saya minta Pemda DIY untuk kembali berpikir ulang sebelum meminta mereka yang positif isolasi sendiri di rumah," bebernnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, mengatakan bahwa aturan yang tertuang dalam Aturan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID Revisi 5 Rementrian Kesehatan mengandung konsekuensi meski memang harus diikuti. "Langkahnya saya kira Pemda DIY tetap menyediakan gedung khusus bagi pasien tanpa gejala sebagai pilihan pertama," bebernnya.

Tidak memilih untuk merawat mereka yang tanpa gejala di rumah sakit, dinilai menjadi langkah yang tepat karena untuk memperimbangkan kapasitas rumah sakit. "Lalu juga memang tidak menentukan penanganan medis secara khusus. Namun demikian, pemantauan dan laporan harian aktifitas oleh yang bersangkutan harus tetap. Setiap hari sesuai durasi waktu yang ditentukan," pungkasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005